

Judul : MRP Minta DOB Papua Ditunda
Tanggal : Senin, 18 April 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

MRP Minta DOB Papua Ditunda

■ FLORI SIDEBANG

JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Yoel Luiz Mulaik, mengeklaim menerima aspirasi masyarakat Orang Asli Papua (OAP) mengenai daerah otonomi baru (DOB) di Bumi Cendrawasih. Menurut dia, banyak OAP yang menolak rencana pemekaran Provinsi Papua yang saat ini dibahas melalui Rancangan Undang-Undang DOB.

"Sebagian besar menolak pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru (DOB) karena dilakukan dengan pendekatan sentralistik yang mengacu pada ketentuan yang baru, yaitu Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otsus Papua," kata Yoel, Sabtu (16/4).

Yoel menyebut, MRP pun menyayangkan langkah Komisi II DPR yang terburu-buru mendorong pemekaran wilayah Papua. Badan Legislasi DPR, lanjutnya, secara cepat menyetujui tiga RUU DOB pada 6 April 2022. Lalu, kurang dari sepekan kemudian, pada 12 April 2022, RUU tersebut disetujui dalam

Rapat Paripurna DPR menjadi RUU Usul Inisiatif DPR, yaitu RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, berharap agar pembentukan DOB dapat memperhatikan implikasi politik, hukum, keamanan, dan juga situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua. Sebab, ia mengungkapkan, tidak sedikit masyarakat setempat yang khawatir jumlah aparat keamanan bertambah, seiring dengan rencana pembentukan DOB.

"Banyak orang Papua yang khawatir jika pembentukan DOB akan diikuti oleh penambahan gelar pasukan dan satuan-satuan teritorial maupun pembentukan polda-polda di provinsi-provinsi baru tersebut," ujar Usman.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan klaim pemerintah mendengarkan aspirasi yang disampaikan MRP. "Saya menyampaikan bahwa penam-

banan baru dilakukan oleh BUMD dan BUMN dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat luas dan masyarakat adat. Hingga saat ini belum ada Izin Usaha Pertambangan (IUP)," kata Mahfud seperti dikutip dari akun *Instagram* resminya @mohmahfudmd, Sabtu (16/4).

Selain itu, sambung dia, dalam kesempatan tersebut, MRP juga menyerahkan surat aspirasi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Mahfud menerima surat itu dan menjanjikan akan menyampaikannya kepada Presiden Jokowi.

Terpisah, anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengaku pihaknya menargetkan tiga RUU DOB di Papua selesai sebelum Juni 2022. "Ada tiga RUU terkait pemekaran di Papua yang pembahasannya dilakukan Komisi II DPR. Kami berusaha sebelum Juni 2022, seluruh RUU itu bisa disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Rifqi panggilan akrab Rifqinizamy di Jakarta, Ahad (17/4). ■ antara ed: agus raharjo

DPR - RI